

**Peran International Labor Organization Dalam Menangani Hak Pekerja
Tekstil Wanita di Bangladesh Studi Kasus *Work In Freedom* (2013 – 2018)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Diajukan oleh:

Nadia Firdaus

17323020

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**Peran International Labor Organization Dalam Menangani Hak Pekerja
Tekstil Wanita di Bangladesh Studi Kasus *Work In Freedom* (2013 – 2018)**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan
Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Sebagian Dari
Syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Diajukan oleh:

Nadia Firdaus

1732302

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Peran International Labor Organization Dalam Menangani Hak Pekerja
Tekstil Wanita di Bangladesh Studi Kasus *Work In Freedom* (2013 – 2018)**

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

21 Juli 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji:

1. Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D.
2. Willi Ashadi, S.H.I., M.A.
3. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
4. Hasbi Aswar, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan



PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Nadia Firdaus
No. Mahasiswa : 17323020
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Peran International Labor Organization Dalam Menangani Hak Pekerja Tekstil Wanita di Bangladesh Studi Kasus Work in Freedom (2013 - 2018)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dan bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi dilakukan oleh orang lain, serta tindakan-tindakan pelanggaran akademik yang lainnya yang bertentangan dengan etika yang dijunjung tinggi oleh Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Balikpapan, 21 Juli 2021



Nadia Firdaus

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala Puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberi karunia dan nikmat yang tiada tara serta memberi kemudahan dan anugerah kepada penulis. Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk :

Keluarga tercinta

Kepada Umi Sundus Umar S.E., dan Abi Jayadi. Terimakasih atas segala perjuangan, lantunan doa yang tidak pernah terputus, dukungan semangat, kepercayaan, limpahan kasih sayang, serta segala bantuan baik moral maupun materi dalam proses pengerjaan skripsi ini sampai selesai. Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi penulis untuk segera menyelesaikan studi. Semoga umi dan abi senantiasa dalam lindungan Allah, diberi kesehatan dan umur yang panjang. Aamiin.

Kepada Muhammad Zaky, S.T., MBA,. Terimakasih atas doa, dukungan semangat kasih sayang yang dilimpahkan kepada penulis. Terimakasih telah menjadi abang terhebat dan role model terbaik yang dimiliki penulis, telah sabar mendengar keluh kesah penulis saat menjalani studi dan mengerjakan skripsi sampai selesai. Semoga diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan dan mencapai mimpi.

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al- Insyirah: Ayat 5-6).

“Anyone from anywhere can do anything”

Tyler Joseph

“Constantly seek criticism. A well-thought-out critique of whatever you’re doing
is as valuable as gold.”

Elon Musk

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran International Labor Organization (ILO) Dalam Menangani Hak Pekerja Tekstil Wanita di Bangladesh Studi Kasus “*Work in Freedom*” (2013-2018)”

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT., yang telah memberikan nafas, menggerakkan tangan dan kaki, menjalankan pikiran serta mendengar segala doa dan harap penulis.
2. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int., M.A., selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasihat, inspirasi dan motivasi selama masa perkuliahan.
3. Bapak Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam membimbing ditengah kesibukannya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya.
4. Seluruh Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu, pelajaran, pengalaman, nasihat serta

inspirasi bagi penulis. Semoga Bapak/Ibu dosen selalu dilimpahi rahmat dan kebahagiaan oleh Allah SWT.

5. Mba Mardiatul Khasanah yang telah memberikan banyak bantuan dan direpotkan oleh penulis selama proses penyusunan skripsi dan di masa perkuliahan.
6. Teman-teman terdekat penulis R.A Dea Agustine, Dara Sonia dan Putri Azaria. Terimakasih telah memberi semangat, berbagi canda dan tawa, saling berbagi ilmu dan membantu penulis sejak awal masa perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi ini. Semoga kalian diberi kesuksesan.
7. Kepada teman-teman seangkatan penulis, Terimakasih telah mau direpotkan dan memberi pertolongan selama perkuliahan dan penulisan skripsi, terimakasih telah membuat penulis betah dan menjadi keluarga kedua penulis di yogyakarta.
8. Semua pihak yang senantiasa mendoakan, menghibur, menyemangati dan mendengarkan keluh-kesah penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah di luangkan.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Balikpapan 21 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	3
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	4
HALAMAN PERSEMBAHAN	5
HALAMAN MOTTO	6
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	9
BAB I	11
PENDAHULUAN	11
Latar Belakang	11
Rumusan Masalah	14
Tujuan Penelitian	14
Signifikansi	15
Cakupan Penelitian	15
Tinjauan Pustaka	16
Landasan Teori/Konsep/Model	17
Metode Penelitian	21
Jenis Penelitian	21
Subjek dan Objek Penelitian	22
Metode Pengumpulan Data	22
Proses Penelitian	22
BAB II	23
KONDISI PEKERJA TEKSTIL WANITA DAN LINGKUNGAN PEKERJAAN DI BANGLADESH	23
Pekerja Tekstil Wanita di Bangladesh	23

Peran Pemerintah Bangladesh Dalam Mengatasi Permasalahan.	26
Sejarah ILO dengan Bangladesh.	28
BAB III	31
ANALISIS PERAN DAN FUNGSI ILO DALAM PROGRAM WORK IN FREEDOM BAGI PEKERJA GARMEN BANGLADESH	31
Analisis Peran ILO Dalam Program Work in Freedom Bagi Pekerja Garmen Wanita di Bangladesh.	32
Arena	32
Instrumen	35
Aktor Independen	40
Analisis Fungsi ILO Dalam Program Work in Freedom Bagi Pekerja Garmen Wanita di Bangladesh.	44
Artikulasi dan agregasi	45
Norma	46
Penerimaan	47
Sosialisasi	48
Pembuatan Kebijakan	49
Pengaplikasian Kebijakan	50
Penegakan Kebijakan	51
Informasi	52
Operasi	53
Hasil Analisis	54
BAB IV	61
PENUTUP	61
Kesimpulan	61
Rekomendasi	64
Daftar Pustaka	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fashion Industry atau industri mode adalah industri yang sedang marak dan sedang dipandang oleh dunia saat ini, terlebih media massa sering sekali menyoroti apa-apa saja yang dikenakan oleh para tokoh publik dunia. *Trend* berbusana sekarang dilihat sebagai penentu kelas sosial masyarakat. Jika seseorang menggunakan ikat pinggang Gucci, tas Chanel dan mungkin sepasang sepatu dari salah satu merk *high fashion* lainnya, maka dia adalah orang berada yang sangat berkecukupan. Hal ini menjadikan orang berlomba-lomba menggunakan dan memperlihatkan betapa mampu dan berkecukupannya mereka membuat industri mode semakin meningkat setiap tahunnya apalagi media saat ini ikut membantu dan mempermudah dalam pemasarannya. Dalam industri mode ada Empat kota yang menjadi kiblat atau yang dijuluki sebagai '*big four*' yakni Paris, London, Milan dan New York. (Helmer, 2019)

Melahirkan banyak sekali lapangan pekerjaan mulai dari kain, desain, riset dan pengembangan, bagian produksi dan lainnya tentu saja industri ini telah menghidupi puluhan juta nyawa diluar sana. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh *Joint Economic Committee US Congress* pada tahun 2015 saja industri mode telah berkembang pesat dan memiliki dampak ekonomi yang sangat besar tidak hanya di lingkaran mode itu sendiri namun mempengaruhi ekonomi kota kota kecil dan sampai ke negara. sampai mempengaruhi perekonomian negara, industri mode ini

menciptakan pekerjaan yang bergaji tinggi serta bergengsi di kalangan masyarakat. (*THE ECONOMIC IMPACT OF THE FASHION INDUSTRY*, 2015) Hal ini tentu mendorong banyaknya masyarakat dunia berlomba-lomba tidak hanya membeli dan menggunakan bahkan membuat brand sendiri.

Industri ini mungkin tidak terlihat sebagai ancaman bagi kehidupan manusia dalam jangka panjang, mengesampingkan fakta bahwa manusia akan terus memiliki perilaku konsumtif tinggi dan akan meningkat seiring berjalannya waktu. Namun jika kita telaah lebih dalam industri mode memiliki beberapa cabang yang salah satunya adalah *fast fashion* atau pergerakan busana yang cepat, dengan harga yang terjangkau dan mengambil contoh design dari pagelaran busana yang dilakukan oleh merek-merek yang memiliki harga yang sulit dijangkau oleh sebagian orang. "*fast fashion*" adalah istilah yang digunakan oleh retail mode untuk memberikan gambaran terhadap desain yang sekelas *high end*, dengan harga yang murah dan produk yang bergerak cepat dari *runway* ke toko untuk memenuhi tren baru. Semuanya dipermudah oleh toko-toko seperti H&M, ZARA, UNIQLO, MANGO dan masih banyak lagi toko serupa untuk memudahkan jangkauan para konsumen-konsumennya.

Saat toko-toko retail ini mempermudah kegiatan konsumen mendapatkan pakaian sebagai suatu hal fungsional yang mana adalah suatu kewajiban yang diperlukan manusia, dengan gaya dan selera individu. Kita lupa bahwa ada banyak pihak yang dirugikan dari hal ini, para pekerja dibelakang nama-nama besar yang telah disebutkan diatas. Bukan tentang mereka yang memiliki perusahaan nya atau menjabat posisi penting di dalamnya, tetapi tentang buruh yang melakukan pekerjaan berat yang lebih terasa lelahnya namun dibayar dengan

sangat minim, bahkan tidak mencapai upah minimum standar. Jika dilihat lebih dekat, dibelakang pakaian atau produk yang disediakan oleh retail tersebut ada tulisan dimana produk itu dibuat dan sebagian besarnya dibuat di Bangladesh. Bangladesh adalah salah satu negara dengan buruh di bidang pakaian paling banyak se asia, lebih dari 4.000 pabrik tekstil dari luar negeri dan sebanyak 3,5 juta penduduk Bangladesh adalah buruh yang membuat 80% pendapatan negara berasal dari sektor ini. Produk produk yang dihasilkan akan diekspor ke pasar global. 85% buruh buruh ini adalah wanita, mereka diberi upah sedikit lebih dari upah minimum negara. (war on want, 2011)

Buruh-buruh ini dipekerjakan secara paksa. Kerja paksa sendiri adalah siksaan yang diberikan kepada Pekerja dibawah ancaman buruh-buruh ini tidak hanya dipaksa untuk bekerja dibawah tekanan namun juga dipaksa untuk lembur diluar jam kerja. Mereka dipaksa bekerja selama 14 jam, menyelesaikan pekerjaan mereka di jam 3 pagi dan kembali bekerja pada jam 7.30, tujuh hari seminggu tanpa adanya kompensasi istirahat. belum lagi banyaknya ancaman-ancaman yang menghantui mereka, seperti pelecehan, diskriminasi, tempat kerja yang tidak nyaman, kebakaran gedung dan banyak lagi ancaman yang harus mereka hadapi namun tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka hasilkan. Padahal bangladesh adalah negara keempat pengeksport tekstil terbesar di dunia.

Dengan banyaknya hal-hal yang meresahkan para Pekerja, maka seharusnya International Labor Organization turun tangan menangani hal ini. ILO adalah atau agensi yang menangani masalah masalah Pekerja di dunia, organisasi ini berada dibawah naungan PBB. Dengan tujuan utamanya adalah mempromosikan hak hak para Pekerja serta meningkatkan perlindungan sosial

dan memperkuat dialog tentang masalah-masalah yang terkait dengan pekerjaan. Pada tahun 2013 ILO membuat proyek Work in Freedom yang memiliki 5 tujuan utama, diantaranya untuk melindungi hak-hak para pekerja migran wanita yang mayoritasnya bekerja di sektor tekstil untuk kawasan Asia terutama di Bangladesh dan pencapaian terhadap hukum yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, topik tentang ketidak tercapaian hak-hak buruh tekstil dan paksaan terhadap pekerja sudah diteliti oleh Madeleine Jalava dengan judul *"Human Rights Violations In the Garment Industry Of Bangladesh"*. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah memaparkan bagaimana peran ILO di dalamnya sebelum, saat dan sesudah proyek Work in Freedom yang digagas oleh ILO. Penelitian ini mencakup 5 tahun perjalanan kerjasama proyek Work in Freedom yang diprakarsai ILO .

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran International Labor Organization (ILO) dalam mencapai dan melindungi hak-hak pekerja tekstil wanita di Bangladesh studi kasus Work in Freedom sejak tahun 2013-2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak program Work in Freedom yang digagas oleh ILO sejak sebelum dilaksanakan, saat dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan sejak tahun 2013 -2018
2. Untuk mengetahui peran ILO dalam mengatasi permasalahan hak-hak pekerja dan upaya penekanan pekerja paksa di Bangladesh sampai 2018
3. Upaya Bangladesh dalam penanganan kesejahteraan wanita

D. Signifikansi

Peran ILO dalam penanganan masalah yang tidak kunjung reda ini dirasa penting untuk diteliti karena di hubungan internasional kita belajar tentang pentingnya hak-hak yang harus didapat oleh per individu yang seharusnya bisa dijamin oleh pemerintah negara. Dan bagaimana peran organisasi internasional dalam menangani saat salah satu negara yang tidak bisa memfasilitasi hak tersebut kepada masyarakatnya, dan menjadi masalah internasional.

E. Cakupan Penelitian

Analisa ini akan mencakup tentang para pekerja tekstil khususnya wanita di Bangladesh, bagaimana mereka diperlakukan secara tidak adil dan dipekerjakan secara paksa dengan upah yang tidak sepadan. Mencakup bagaimana peran ILO dalam menangani dan dampak Work in Freedom di tahun 2013-2018.

F. Tinjauan Pustaka

Didalam sebuah penelitian, diperlukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Madeleine Jalava (2015) membuka banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pengusaha garmen Bangladesh yang akibatnya harus dirasakan oleh para pekerja, hal ini berlangsung sejak lama dan belum teratasi sampai ditulisnya thesis Madeleine di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bagaimana ketidakmampuan pemerintah setempat untuk mengatasi permasalahan yang telah mengakar sejak lama. (Jalava, 2015, 25)

Begitu juga yang ditulis oleh Nandita Farhad di tahun 2019 menurutnya, hal-hal yang disebutkan diatas diantaranya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pekerja, mereka tidak tahu apakah mereka layak diupah segitu, apakah hal itu adil atau tidak, dan mereka tidak tahu harus mengadu ke siapa. Hal ini tentu benar dan akan terus begitu karena para generasi mudanya juga bekerja disektor yang sama tanpa sempat mendapat pendidikan yang layak untuk edukasi yang lebih *advance* karena kurangnya pendapatan dan tidak adanya ruang untuk mengembangkan potensi diri. Hal ini terus berulang seperti lingkaran setan. Dan tidak akan ada peningkatan sampai kapanpun jika pemerintah maupun generasi muda dari negara yang bersangkutan tidak memandang pentingnya hal ini bagi kelanjutan negara di masa depan.

Ada banyak sekali yang memandang pentingnya masalah hak asasi yang perlu didapatkan oleh para pekerja tekstil ini seperti Jan-Christian Niebank dalam analisisnya yang berjudul "*Bringing Human Rights into Fashion*" didalam

analisis nya, Niebank menyebutkan bahwa wanita dinilai lebih mudah mendapat diskriminasi yang sebagian besar dilakukan oleh supervisor kepada bawahannya, beberapa dari mereka ada yang kerja dibawah kontrak dan tanpa kontrak. Jadi saat meminta pertanggung jawaban tersendat karena tidak adanya kontrak yang berlaku. Kerja paksa juga adalah salah satu masalah penting terutama dibidang paling bawah atau paling awal produksi seperti pemintalan kapas, dilakukan demi menekan biaya pekerja dan mendapat keuntungan yang tinggi. Dan karena para pekerja ini tidak bisa memberontak. (Niebank, 2018)

Dalam hal upah juga dibahas bagaimana seharusnya pekerja pekerja tekstil ini diberikan upah minimum dan bagaimana seharusnya upah ini berlaku untuk mensejahterakan mereka. Sedangkan upah upah yang tidak dibayar sebagaimana seharusnya menempatkan para pekerja sebagai forced labor walaupun mereka dibayar. Sebenarnya kesadaran tentang buruknya dampak yang dibawa oleh *fast fashion* ini sudah banyak menimbulkan dampak seperti *clean clothes campaign*, *fair wear foundation* dan banyak lagi. Hal ini diulas di *fair wear foundation* dengan judul “*Country Study, Bangladesh*”.

G. Landasan Teori/Konsep/Model

Dalam memudahkan penulis untuk menjawab rumusan masalah diatas, diperlukan landasan teori untuk menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Menurut Jonathan H. Turner, teori mweupakan prose mengembangkan ide ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Teori juga merupakan sebuah sistem dari konsep konsep abstrak dan hubungan dari konsep yang membantu kita untuk memahami fenomena menurut Littlejohn dan Karen Foss. berdasarkan pemahaman tersebut teori yang akan

penulis gunakan dalam menguraikan permasalahan ini adalah konsep Organisasi Internasional.

Organisasi internasional adalah organisasi antar negara yang mengikat melalui perjanjian untuk melakukan hal hal yang sifatnya ketercapaian tujuan bersama. Menurut Clive Archer, organisasi internasional adalah struktur formal yang dibentuk atas kesepakatan anggota (pemerintah yang bersangkutan atau non pemerintah) secara terus dan berlanjut oleh dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai tujuan bersama dengan para anggotanya. Sederhananya, organisasi ini dibentuk untuk menghubungkan negara negara maupun non-negara untuk menjalin kerjasama, membangun hubungan baik, mereka memiliki berbagai agenda dan perjanjian perjanjian untuk tujuan yang sama.

Menurut Clive Archer, setiap interpretasi dapat menghasilkan evaluasi yang berbeda atas peran dan fungsi organisasi internasional. Jadi, jika saat ini sistem organisasi internasional dipandang sebagai hasil yang diperlukan dan berkelanjutan dari politik kekuasaan, maka suatu lembaga organisasi internasional sendiri akan memiliki aspek dan ruang gerak yang terbatas dan menjadi lembaga untuk memperbaiki konsekuensi yang tidak diinginkan dari hubungan antar negara negara berdaulat. Peran organisasi internasional sendiri terbagi menjadi 3 yaitu Arena sebagai wadah bagi setiap aktor untuk bermusyawarah dan mendiskusikan perihal perihal penting, menjadi aktor yang membantu masalah masalah negara dan non negara, menjadi instrumen sebagai pembuat kebijakan dan perjanjian perjanjian penting. Peran organisasi internasional seharusnya dapat dilihat sebagai bagian dari institusi yang mendukung tatanan tersebut.

Organisasi internasional memiliki 3 jenis utama, yaitu *International Non-Governmental Organization* (INGO), *International Governmental Organization* (IGO), dan *Hybrid Non-Governmental Organization* (Hybrid NGO). INGO adalah organisasi non-negara yang bergerak tanpa memihak pemerintah manapun dan dibuat oleh aktor non negara. biasanya bergerak di bidang kesehatan masyarakat, pekerja, peperangan dan hukum internasional seperti Obama care, Bill Gates Foundation. sedangkan IGO adalah organisasi internasional yang bekerjasama dengan negara atau beranggotakan perwakilan negara negara berdaulat seperti hal nya ILO atau UNICEF. Hybrid adalah gabungan dari dua diatas yang anggotanya terdiri dari aktor non negara dan aktor negara yang bekerjasama serta melakukan kegiatan berdasarkan satu tujuan seperti ECPAT, FINCA dan lain sebagainya. Menganut pemahaman ini, ILO termasuk dalam Organisasi Internasional Pemerintah atau IGO.

Organisasi internasional menurut Archer memiliki 3 peran penting dan 9 fungsi. Peran penting ini mencakup Arena atau Forum, dimana organisasi internasional menjadi wadah untuk membicarakan atau mengadakan pertemuan terkait masalah atau kasus yang sedang dihadapi. Peran yang kedua adalah menjadi Instrumen yaitu alat untuk mengkaji ulang dan memperbarui undang-undang yang telah ada dan memberi rancangan kepada pemerintah berwenang untuk disahkan, dan melakukan perjanjian kerjasama dengan para mitra dan rekan kerja yang telah disepakati untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu peran terakhir yang menjadi kriteria organisasi internasional adalah peran sebagai Aktor Independen dimana organisasi internasional dapat melakukan suatu hal tanpa adanya intervensi dari suatu negara terkait.

Selain peran, organisasi internasional juga memiliki fungsi bagi anggota anggotanya. Ada 9 fungsi organisasi internasional demi tercapainya tujuan yaitu sebagai artikulasi dan agregasi, fungsi ini termasuk dalam urusan kepentingan internasional seperti asosiasi kelompok tertentu untuk suatu kepentingan tertentu. organisasi internasional berfungsi sebagai norma dimana organisasi internasional dapat membuat norma dan peraturan yang mengikat bagi tiap-tiap anggotanya. Fungsi lainnya adalah organisasi internasional menjadi rekrutmen atau penerimaan, penerimaan disini artinya organisasi internasional menjadi tempat, wadah atau perantara untuk mengumpulkan mitra dan rekan kerja yang memiliki visi misi yang sama agar tujuan dapat tercapai lebih cepat mendapat bantuan dari kerjasama-kerjasama dengan para mitra ini tadi.

Fungsi organisasi internasional lainnya adalah Sosialisasi menurut archer sosialisasi bertujuan untuk menanamkan kesetiaan individu ke sistem politik dimanapun mereka hidup dan untuk mendapatkan penerimaan dari nilai yang berlaku di sistem dan lembaganya. Fungsi lainnya adalah pembuatan kebijakan, organisasi internasional akan mengkaji kebijakan yang ada dan berlaku dan memberikan kepada pemerintah yang berwenang untuk disahkan. Kemudian organisasi internasional akan mengawasi pengaplikasian kebijakan, setelah mengkaji ulang dan disahkan oleh pemerintah berwenang organisasi internasional akan mengawasi bagaimana jalannya hukum itu, apakah diindahkan ataukah tidak. Jika tidak diindahkan dan tidak dijalankan dengan baik, organisasi internasional melanjutkan dengan penegakan kebijakan seperti memberi kritik, menjadi mediator atau bahkan memberikan sanksi. Fungsi kedelapan yang dimiliki oleh organisasi internasional adalah menjadi informasi. Menjadi

informasi disini artinya organisasi internasional memberi informasi terkait permasalahan global kepada anggotanya begitu pula sebaliknya. Yang terakhir adalah operasional dimana organisasi internasional melakukan sesuatu atau bertindak untuk menyelesaikan masalah atau suatu agenda yang telah dibuat.

Teori Organisasi Internasional menurut Clive Archer ini dirasa mampu untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Bangladesh sejauh ini telah menerima cukup banyak bantuan dari organisasi-organisasi internasional yang ada salah satunya dari ILO. ILO sebagai organisasi internasional yang berusaha melakukan peran dan fungsinya untuk membantu memecahkan masalah yang dialami negara-negara salah satunya Bangladesh yang sebagian besar masyarakatnya bekerja menjadi buruh tekstil. Ketidakmampuan Bangladesh dalam menangani masalah ini sendiri membuat organisasi internasional menjalankan peran dan fungsinya kepada negara negara yang berkenan untuk bekerjasama demi memberantas masalah yang ada

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang akan saya lakukan berdasarkan data data *valid* yang ada dan *relate* dengan studi kasus, lalu akan dielaborasi dengan teori yang akan saya gunakan. Metode ini akan berusaha memecahkan hal hal yang bersifat penjabaran data dan bersifat deskriptif untuk memudahkan dalam menjawab rumusan masalah yang telah saya leburkan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian saya akan berfokus kepada *International Labor Organization* dan negara Bangladesh serta para pekerja wanita yang mungkin belum sadar bahwa mereka adalah korban eksploitasi tenaga kerja. Objek yang akan saya fokuskan adalah bagaimana peran ILO dalam menghadapi eksploitasi tenaga kerja wanita yang terjadi di negara bangladesh sebagai salah satu negara yang bekerjasama dengan banyak sekali perusahaan fast fashion amerika.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam riset ini saya akan menggunakan data sekunder, data sekunder ini bersifat mengkaji ulang data data yang telah ada untuk membuktikan suatu hal.

4. Proses Penelitian

Proses pengumpulan data yang akan saya gunakan adalah proses dokumentasi. Menurut Louis Gottschalk (1986) berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan tertulis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Maka dokumentasi adalah salah satu cara untuk mencari bahan dari dokumen yang sudah ada dan merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian.

BAB II

KONDISI PEKERJA TEKSTIL WANITA DAN LINGKUNGAN

PEKERJAAN DI BANGLADESH

A. Pekerja Tekstil Wanita di Bangladesh

Bekerjasama dengan sekian banyak perusahaan perusahaan fast fashion, Bangladesh menjadi salah satu negara dengan pekerja tekstil terbanyak di Asia. Banyaknya jumlah pekerja di sektor ini tentu saja mempengaruhi sektor ekonomi negara dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh negara dengan brand brand besar seperti H&M, Zara, UNIQLO, GAP dan masih banyak lagi. Industri ini sendiri saja menghasilkan 80% dari total pendapatan ekspor di Bangladesh yang adalah kedua terbesar di dunia di sektor garmen setelah China. Namun tingginya angka ekspor dan pendapatan negara tidak berbanding lurus dengan kehidupan pekerjaanya yang 85% dari keseluruhannya adalah wanita.

Wanita di Bangladesh masih dipandang sebagai kelompok yang “bukan pencari nafkah”, masih menjunjung tinggi konsep patriarki wanita-wanita ini lebih didorong untuk mengerjakan hal hal domestik dan hal hal yang katanya mudah. Dalam hal karir, wanita lebih disukai untuk pekerjaan-pekerjaan yang non supervisor dikarenakan ekspektasi tradisional masyarakat yang dibina secara turun temurun karena wanita dinilai lebih penurut, dapat diatur dan lebih setia dibandingkan laki laki. Oleh sebab itu, laki-laki di Bangladesh lebih mudah untuk menduduki jabatan jabatan penting di perusahaan atau pabrik. Selain itu, adanya *purdah* dalam tatanan sosial secara tradisional membuat wanita selalu dipandang sebelah mata serta memisahkan aspek domestik dan membatasi kemampuan

wanita dalam bekerja diluar rumah. Bahkan kekerasan merupakan hal yang diwajibkan serta dipraktekkan sebagai cara mendidik dan mengontrol para wanita. Hal ini tentu saja berdampak bagi pendapatan wanita terutama buruh tekstil karena dipandang tidak untuk menafkahi dan mereka membutuhkan pekerjaan lebih daripada pabrik membutuhkan mereka akhirnya bayaran yang didapat oleh para buruh ini tidak layak. Kurangnya edukasi terhadap hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya hal seperti ini.

Beberapa riset menunjukkan bahwa para pekerjaan dapat meningkatkan otonomi perempuan, pengambilan keputusan di dalam rumah tangga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan mengontrolnya sendiri, turunnya angka nikah muda, dan turunnya angka kelahiran dan meningkatkan kemandirian wanita dalam kehidupan. namun, hal ini juga membawa dampak buruk bagi perempuan pekerja seperti meningkatnya angka IPV yaitu Intimate Partner Violence. dan beberapa penelitian diantaranya fokus kepada wanita yang mengalami pelecehan di tempat kerja. Walaupun seluruh pekerja baik wanita maupun pria dalam hal ancaman dan pelecehan akan selalu ada namun wanita akan selalu menjadi pihak yang tidak pernah merasa aman. Di Bangladesh, hal ini terus terjadi dan belum ada titik balik yang signifikan sejak tahun 1990.

Sebagai pekerja, mereka juga tidak mendapatkan keadilan. Biasanya, semakin sulit, rumit dan beresiko pekerjaan nya akan berbanding lurus dengan pendapatan pekerjanya. Dengan pekerjaan yang memakan waktu 11 jam 21 menit per harinya, ini merupakan kelebihan kerja 3 jam dari pekerjaan ideal. belum lagi sebagai wanita seharusnya mendapatkan cuti hamil dan melahirkan dan difasilitasi

oleh perusahaan, namun perusahaan tidak memberikan apa yang mereka janjikan kepada para pekerja wanita ini. Para pekerja ini harus melakukan tugas rumah mereka dan transportasi menuju pabrik juga tidak mudah. menjadi pekerja di ibukota dengan pendapatan rendah tentu tidak mudah karena pengeluaran dan biaya hidup di Dhaka cukup tinggi. Dan beberapa diantaranya bekerja berdiri sepanjang hari. keamanan dan keselamatan kerja di pabrik juga tidak difasilitasi dengan baik akibatnya mereka sering terpapar polusi suara, udara dan air di tempat kerja dan hal ini akan menyebabkan resiko jangka panjang yang tidak mudah untuk diobati. Dan jika upah minimum kerja yang ditetapkan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakatnya maka hal ini sudah termasuk ke pelanggaran Hak Asasi Manusia dimana setiap manusia seharusnya dapat merasa aman dan nyaman di negara yang mereka tempati sebagai warga negara. Namun hal ini tidak dirasakan oleh mereka, wanita selalu teropresi dan tidak dibayar dengan layak. sebagian diantaranya tidak dapat menyekolahkan anak mereka dan akan berakhir menjadi buruh pabrik tekstil sebagaimana orang tuanya terutama ibunya.

Dalam bekerja seharusnya pekerja merasa bebas dalam berasosiasi. dan seharusnya juga didengar. Sehari sebelum runtuhnya Rana Plaza di tahun 2013 yang menelan kurang lebih 1,132 nyawa dan 2500 diantaranya terluka, gedung itu sudah dievakuasi karena banyak retak retak dan pecah sudah sampai ke lantai bawah yang berisi Bank dan toko toko. Saat lantai bawah sudah ditutup demi kepentingan evakuasi, para pekerja pabrik tekstil yang bertempat di lantai atas tidak diberi kelonggaran dan tetap dituntut untuk bekerja.

B. Peran Pemerintah Bangladesh Dalam Mengatasi Permasalahan.

Bangladesh adalah negara berkembang di asia selatan. menjadi negara ke-delapan dengan populasi terbanyak di dunia yang diestimasi sebanyak 162 juta jiwa (Jalava, 2015, 24). berlokasi di antara india dan burma. Dhaka sebagai ibukota negaranya, berisikan 18 juta jiwa. Dengan pendapatan perkapita negara berdasarkan paritas daya beli pada tahun 2013 sebesar \$2.948 atau Rp.42,855,076 pada tahun 2013 jumlah ini merupakan yang terendah kedua se-Asia Selatan setelah Nepal. Sekitar 31.5% masyarakatnya hidup dibawah garis kemiskinan dengan biaya hidup sebesar \$1,25 per-hari atau sebesar Rp.18000 . Walaupun angka harapan hidupnya telah meningkat deras setelah 40 tahun, yang tadinya 46 tahun menjadi 70 tahun. Tetapi 41% remaja Bangladesh yang berusia 15 tahun keatas tidak bisa buta huruf. Mata uang yang digunakan Bangladesh adalah Taka (BDT) (World Bank 2020).

Sebagai negara merdeka yang berdaulat, Bangladesh merupakan negara yang masih muda jika diibaratkan manusia. Namun, masalah yang dihadapi begitu kompleks dan banyak. Mulai dari menjadi negara terkorup ke 145 dari 175, menjadi negara dengan korban kekerasan karena kericuhan pemilihan umum yang menelan 120 jiwa dan yang paling marak adalah masalah kurangnya ketersediaan hak-hak pekerja tekstil terutama perempuan di Bangladesh. Peningkatan pesat yang terjadi di industri garmen disebabkan oleh strategi ekspor negara dan ikut di bangun oleh para petinggi negaranya. Diperkirakan sekitar 60% dari 300 anggota

parlemen ikut berkecimpung di dunia garmen dan 10% memiliki pabrik garmen yang bekerjasama dengan perusahaan perusahaan (NY Times 2020). Korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negara yang biasanya dengan suap untuk memudahkan izin dan sertifikat dan berkontribusi penting terhadap pembangunan pembangunan ilegal yang berbahaya.

Fakta bahwa para petinggi negaranya berbisnis di industri garmen sebenarnya tidak mengagetkan, mengingat Bangladesh adalah negara kedua terbesar sebagai pengeksport tekstil siap pakai, hanya satu tingkat dibawah China. Menjadi pemasukan terbesar negara selama bertahun tahun sampai saat ini bahkan pada tahun 2013-2014 industri ini sendiri berkontribusi sebanyak 80% dari total pendapatan ekspor negara dan mempekerjakan sebanyak 4 juta pekerja. Tidak salah jika negara ini menumpukan pembangunan dan pendapatan di sektor tekstil dan pabrik pengolahannya.

Sejak tahun 1974 ada perjanjian yang disebut Multi Fiber Arrangement yang mengatur dan membatasi ekspor dari negara berkembang ke negara maju dalam hal tekstil namun Bangladesh dikecualikan karena masih belum memiliki industri tekstil yang stabil dan besar pada saat itu. Karena negara negara lain dibatasi dalam ekspor garmen siap pakai nya, maka Bangladesh mendapat banyak keuntungan dengan meningkatnya produsen-produsen yang kemudian berinvestasi dan menjalin kerjasama dengan Bangladesh. Walaupun perjanjian ini berakhir di tahun 2004, kesuksesan Bangladesh dalam industri garmen tidak surut dibuktikan dengan peringkat kedua terbesar di dunia.

Sebagai negara yang menaungi industri garmen sebanyak itu, Bangladesh tentu sadar atas hal hal yang tidak bisa mereka penuhi dan kendalikan. Adapun institusi-institusi negara yang berkecimpung dan ikut mensukseskan industri ini. seperti Ministry of Labour and Employment yang memiliki tujuan utama untuk menekan angka dari bahaya kelaparan di negara dengan menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk belajar mengasah skill baru. Ministry of Commerce dengan mempedulikan kebijakan regulasi dan implementasinya, Setelah bertahun tahun melakukan berbagai cara untuk kesenangan seluruh pihak seperti peningkatan upah minimum buruh yang telah tiga kali diamandemen oleh negara dan seharusnya meningkat setiap lima tahun sekali. Sebagai negara berdaulat tentu Bangladesh sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan meminta bantuan demi bantuan dan mengesahkan kebijakan yang diperuntukan bagi para pekerja tekstil wanita ini, namun usaha penyamaan upah antara pria dan wanita tetap tidak dapat dicapai karena hal-hal domestik yang dipengaruhi oleh para pekerja.

C. Sejarah ILO dengan Bangladesh.

International Labor Organization atau yang disingkat ILO, organisasi ini fokus kepada pekerja pekerja di dunia sebagai komoditas. Mengatur dan menertibkan serta sebagai tempat dimana pekerja merasa dilindungi. Di Bangladesh sendiri ILO sudah aktif sejak 1973 dan bekerjasama dengan pemerintah, para pekerja dan pegawai organisasi. ILO sendiri bekerjasama dengan pemerintah Bangladesh dengan mewadahi pekerja pekerja Bangladesh seperti

Bangladesh Employers Federation (BEF), Industrial Bangladesh Council (IBC) dan *National Coordination Committee for Workers Education (NCCWE)* sebagai alat untuk meningkatkan kondisi kerja dan meningkatkan *awareness* pekerja tentang hak-hak nya di industri garmen.

Mayoritas kerjasama yang dijalin ILO dengan Bangladesh bergerak di bidang garmen. ILO telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja tekstil di Bangladesh. seperti *Better Work Programme* yang memfasilitasi kebijakan nasional untuk para pekerja dengan mempromosikan keikutsertaan pabrik garmen dalam berkompetisi. ILO juga disponsori oleh Kanada, Belanda dan UK dalam peningkatan kondisi kerja di sektor tekstil siap pakai di Bangladesh sejak tahun 2017-2023. Selain itu, ILO juga membuat program untuk mengedukasi kesehatan keselamatan kerja di pabrik industri garmen belajar dari kesalahan yang terjadi di Rana Plaza dan Tazreen Factories yang tentu saja masih menjadi momok bagi sebagian besar pekerja.

Tragedi Rana Plaza yang terjadi di tahun 2013 yang menewaskan ribuan nyawa juga dibantu pemulihannya oleh ILO dengan program yang digagas saat itu untuk menurunkan angka kecelakaan kerja terutama di industri garmen di Bangladesh. Dengan disahkannya undang-undang tenaga kerja Bangladesh yang baru, ILO mampu menunjukkan pengaruh secara signifikan lewat implementasi *National Tripartite Actions and Plan*. Dimana kesehatan keselamatan kerja sebuah pabrik benar benar dipantau dan dilihat sampai akhirnya diberikan izin untuk bekerja. Selain itu, para pekerja juga diberikan pengetahuan terhadap pencegahan dan cara mengatasi jika terjadi kebakaran atau bencana yang tidak diinginkan sewaktu waktu.

Work in Freedom sendiri merupakan salah satu program ILO di Asia Selatan yang memfokuskan kepada salah satu cabang perdagangan manusia terutama wanita dengan cara mempekerjakan mereka “secara paksa” dengan bayaran yang tidak adil jika dibandingkan dengan jam kerja dan fasilitas yang didapatkan. Program ini memiliki rentan waktu 5 tahun sejak 2013 sampai 2018 dengan budget 8.3 juta poundsterling atau setara dengan 166 miliar Rupiah. Dibiayai oleh UK Department for International Development untuk meningkatkan kesadaran nilai dari wanita dan anak perempuan yang mayoritas menjadi pekerja migran di sektor industri garmen.

Berdasarkan sejarah panjang yang telah dilalui oleh Bangladesh dan ILO dalam berbagai program untuk menyelesaikan masalah pekerja tekstil wanita ini seperti Better Work Bangladesh dan menetapkan pajak kepada bagian bagian yang berwenang. Kerjasama kerjasama ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah tekstil siap pakai, namun karena banyaknya tumpang tindih permasalahan yang dihadapi negara terkait industri tekstil ini membuat hal ini tidak kunjung selesai dan terus dilanjutkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat standar.

BAB III

ANALISIS PERAN DAN FUNGSI ILO DALAM PROGRAM *WORK IN FREEDOM* BAGI PEKERJA GARMEN BANGLADESH

Di Asia Selatan pekerja wanita hanya bergerak sekitaran hal hal yang sifatnya substansial dan pengurusan reproduksi yang cenderung domestik. Pekerjaan yang dilakukan oleh para perempuan sering dianggap remeh yang akhirnya tidak diakui, dibayar dengan tidak sesuai atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Sektor pekerjaan yang dengan bayaran terbesar untuk wanita adalah sebagai perawat atau sektor garmen dan tekstil yang keduanya. Bertujuan untuk membuat pekerja migran wanita dari Asia Selatan merasa aman, karena ada jutaan wanita yang “dijual” dari negara-negara Asia Selatan tiap tahunnya untuk dipekerjakan seperti buruh paksa terutama di industri garmen dan tekstil. Dengan meningkatkan awareness akan kekuatan yang dimiliki oleh wanita dan anak anak perempuan, edukasi, rekrutmen yang adil, migrasi yang aman dan pekerjaan yang layak.

Berdasarkan teori Organisasi Internasional yang telah dikemukakan oleh Clive Archer, organisasi internasional sendiri memiliki tiga peran utama yaitu arena, aktor independen, dan instrumen. Program-program yang telah dilaksanakan oleh ILO di sektor industri garmen di wilayah Asia Selatan bisa dikatakan berperan sebagai ketiganya. Di Bangladesh sendiri, ILO mampu memperluas dampak jangkauannya sampai akhirnya bisa mencakup ketiga peran utama organisasi internasional secara umum.

A. Analisis Peran ILO Dalam Program *Work in Freedom* Bagi Pekerja Garmen Wanita di Bangladesh.

Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan peran ILO sebagai organisasi internasional di dalam penyelesaian hak-hak para pekerja wanita di sektor industri garmen di Bangladesh dan implementasinya terhadap program *Work in Freedom* disaat sebelum mulai yaitu di tahun 2010-2013, pada saat jalannya program di tahun 2013-2015 dan bagaimana situasi dan kondisi setelah program itu selesai.

a. Arena

Sesuai dengan peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Archer. Peran arena dalam organisasi internasional, yakni organisasi internasional dijadikan sebagai tempat pertemuan atau forum bagi negara anggota untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Organisasi internasional dijadikan sebagai tempat atau wadah untuk bisa mengeluarkan pendapat agar bisa menemukan sebuah solusi atau titik terang suatu masalah.

Berdasarkan peran arena menurut Archer tersebut, maka dalam penelitian ini ILO dijadikan sebagai tempat pertemuan bagi negara Bangladesh dengan negara yang bersangkutan dengan program *Work in Freedom*. ILO dapat menjalankan program kerjasama hanya jika ada persetujuan eksplisit dari pemerintah bersangkutan dengan berbentuk MoU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengatur persyaratan perjanjian. Dibagi

menjadi dua secara administratif, Work in Freedom yang dikelola ILO New Delhi berfokus kepada implementasi berbasis lapangan dari hasil program yang dilakukan di Asia Selatan. Satunya lagi berfokus kepada fungsi penelitian atau pengetahuan dan dukungan teknis dari suatu program seperti kerangka dan eksekutifnya dikelola oleh kantor pusat ILO di Geneva. Program Work in Freedom ini disahkan di bulan April 2013 oleh DFID dan ILO setelah disetujui oleh para menteri Inggris. Dengan memperhatikan dari bagaimana proses perekrutan sampai para pekerja ini bekerja dan menerima penghasilannya, program work in freedom ini mengadakan pertemuan pada bulan April 2014 dengan para pemilik kepentingan terhadap rekrutmen pekerja garmen ini di Turin, Italia yang dihadiri *Organization of Employers (IOE)*, *International Trade Union Confederation (ITUC)*; *International Confederation of Private Employment Agencies (Ciett)* dan agen perekrutan serta asosiasi dari negara asal dan tujuan seperti, *Nepal Association of Foreign Employment Agencies (NAFEA)*, *FSI Worldwide (FSI)*; *NGOs: Institute for Human Rights and Business (IHRB)*, *Ethical Trading Initiative (ETI)*, and *Verité*. (International Labor Organization, 2019)

Pada bulan Juli 2014 diadakan dari tanggal 22 - 24 terkait program Work in Freedom dan bertujuan untuk membahas tentang rekan-rekan yang telah tergabung dan memperkenalkan yang baru tergabung di dalam program. Pertemuan ini di prakarsai oleh ILO

yang digelar di Gokarna Forest Resort, Thali, Kathmandu 20498, Nepal. Pertemuan yang berlangsung selama tiga hari ini membahas tentang ekspektasi-ekspektasi umum terkait kerjasama yang dilakukan dengan program ini dan menyatukan dan menguatkan visi misi terkait strategi yang telah disusun serta dampak dari program ini. Dihadiri oleh rekan rekan yang bekerjasama dengan ILO untuk *Work in Freedom* seperti *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)*, *Migrant Forum Asia (MFA)*, *Anti Slavery International (ASI)*, *International Domestic Workers' Network*, *International Trade Union Congress (ITUC)*, *Self Employed Women's Association (SEWA)* and *London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)*. (International Labor Organizations, 2014)

Pada tahun 2015 Work in Freedom (ILO) mengadakan pertemuan dengan agensi pekerja sebagaimana diketahui agensi pekerja memberikan kontribusi yang cukup besar karena menjadi jembatan antara para pencari kerja dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Dalam pertemuan ini, ILO melakukan konsultasi yang bertempat di New Delhi, India. Inisiasi ini berfokus kepada pencegahan perdagangan, menjaga hak-hak pekerja terutama di fase perekrutan dan penempatan, dan meningkatkan pengembangan untuk pekerja dan keluarganya.

Pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh ILO dengan mitra-mitranya terkait program Work in Freedom ini adalah salah

satu bukti keberhasilan ILO berperan menjadi arena. Dengan diadakannya pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi, menyusun strategi, berdiskusi, membuat kebijakan dan bertukar pendapat untuk memudahkan jalannya program mencapai tujuan utamanya. Dalam membuat kebijakan dan perjanjian baik antar organisasi internasional, maupun organisasi internasional dengan aktor politik internasional lainnya juga merupakan peran dari organisasi internasional sebagai salah satu alat dalam sistem internasional yaitu menjadi instrumen.

b. Instrumen

Peran lainnya dari organisasi internasional adalah menjadi instrumen atau alat yang digunakan anggotanya untuk kepentingan negara anggotanya. Anggota dari *inter-governmental organization*-nya adalah negara-negara berdaulat yang dapat membatasi kegiatan independen dari organisasi itu sendiri. Dengan peran organisasi internasional sebagai instrumen berarti organisasi internasional dijadikan salah satu faktor tambahan atas kebijakan negara anggotanya yang mempengaruhi konstitusi dan pembangunan negara. Akan tetapi, menurut Myrdal hal ini merupakan gagasan fiktif semata karena negara tidak mungkin ingin lepas kendali atas salah satu kebijakannya. Bentuk kebijakan yang diterima biasanya adalah pengaturan kerjasama, perjanjian multilateral yang didelegasikan dengan kewenangan terbatas seperti PBB dan organisasi internasional lainnya. Hal itu

merupakan janji bersama dengan peraturan negara yang telah terkoordinasi dan tersinkronisasi.

Berdasarkan pemahaman Archer atas peran organisasi internasional sebagai instrumen, program Work in Freedom meninjau dan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang telah ada serta strategi yang telah berjalan sebelumnya terkait para pekerja garmen di Bangladesh. ILO sebagai organisasi internasional yang memprakarsai program ini menandatangani perjanjian implementasi dengan Confederation of Private Employment Agencies (CIETT) atau konfederasi internasional agen tenaga kerja swasta, perjanjian ini bertujuan untuk mendorong perekrutan yang adil bersamaan dengan berjalannya Work in Freedom di Bangladesh. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka akan melibatkan kerjasama dengan International Human Rights and Business (IHRB) terkait hak asasi manusia yang bertujuan untuk mendorong implementasi program di negara target guna menekan salah satu faktor utama pelecehan dan perekrutan yang tidak adil di dalam proses perekrutan pekerja tekstil wanita seperti masalah biaya terutama gaji pekerja, masalah pelecehan yang terjadi di dunia kerja yang harus dialami para wanita pekerja baik migraine dan domestik, ketidakadilan dan lain sebagainya.

Perjanjian lainnya yang dilakukan oleh ILO terkait dengan pekerja migran sektor tekstil lainnya dari segi perekrutan. Pada tahun pertama, melalui laporan kerjanya ILO bekerjasama dengan

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam bertindak terhadap pencegahan dan menghadapi pelecehan serta penipuan dalam perekrutan tenaga kerja. Diinisiasi oleh ILO dan diresmikan di Geneva pada sesi ke-29 *Human Rights Council* sebagai upaya bersama dalam pencegahan perdagangan manusia melalui pengaturan perekrutan tenaga kerja. Inisiatif ini mendapat dukungan tidak hanya dari pemerintah namun juga mendapat dukungan dari perwakilan Organisasi pengusaha dan buruh di seluruh dunia. (United Nations Office on Drugs and Crime, 2015).

Perjanjian kerjasama ini meng-cover pengembangan-pengembangan seperti materi pelatihan bagi pekerja dan penyelesaian program, pengembangan kapasitas untuk kira-kira sebanyak 500 inspektur ketenagakerjaan, polisi dan petugas-petugas penegak hukum lainnya di Bangladesh dan India. Perjanjian ini dibuat dengan harapan akan memudahkan tenaga kerja. Dengan anggaran sebanyak 275.000 USD. (International Labor Organizations, 2015)

Mengkaji ulang peraturan yang telah ada terkait para pekerja migran wanita di sektor tekstil menurut program Work in Freedom ILO sebenarnya negara-negara penerima sudah memiliki peraturan yang kuat dan bahkan mengedukasi para calon pekerja tentang risiko-risiko yang akan mereka hadapi. Namun, para pembuat kebijakan ini lebih berhati-hati dalam mengaplikasikan undang-undang ketenagakerjaan di negara tujuan, bahkan terhadap

pelanggaran yang didokumentasikan dengan baik. Perlawanan yang dilakukan oleh korban akan lebih jelas karena dalam proses pengaplikasian nya mempengaruhi keseimbangan kekuasaan antara pekerja migran dan majikannya atau dengan kontraktornya. Jadi, kebijakan tentang ekonomi politik migrasi dan anti perdagangan manusia ini jika disimpulkan bagaimanapun kerja paksa terjadi dan terdokumentasikan dengan baik, akan diabaikan secara selektif sehingga tidak ditangani dengan baik. Kalaupun ada yang masuk ke jalur hukum dan dipidana, maka pidananya akan berfokus ke pemberian sanksi kepada perekrutnya dan para agensi ini akan melakukan perekrutan secara sembunyi sembunyi. Jika hal ini terjadi maka para pekerja migran akan menghadapi ancaman dan risiko yang lainnya dan masalah yang diawal tidak terselesaikan.

Ketentuan hukum ini mengikat semuanya termasuk pekerja, jika suatu perusahaan atau salah satu dari tiga faktor utama (pemerintah, pekerja dan agensi perekrutan) melakukan kesalahan yang merugikan maka kemungkinan yang akan terjadi adalah ditutupnya perusahaan atau pabrik pembuatan. Jika hal itu terjadi maka para pekerja juga akan menganggur dan tidak memiliki penghasilan. Kebijakan-kebijakan ini lebih berfokus kepada kebijakan secara kontrak dan perekrutan pekerja yang formal namun fleksibel dalam kerangka kerja yang tidak mengikat. Karena tidak adanya skala ukur yang signifikan terkait pertumbuhan gerakan anti perdagangan manusia yang cenderung

mendorong kriminalisasi agensi pekerja informal daripada meningkatkan kondisi kerja atau tidak membolehkan perempuan bekerja jauh dari rumah daripada mendorong hak-hak yang sama untuk mobilitas tenaga kerja baik wanita maupun pria. Adanya kontradiksi terhadap kebijakan tentang perekrutan tenaga kerja yang lebih baik namun jika dilihat lebih dalam lagi akan mempromosikan kebijakan yang melemahkan hak-hak perempuan pekerja migran.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat atau diperbarui oleh ILO bisa dikatakan ada yang berhasil dan ada yg tidak. Salah satu keberhasilan ILO adalah karena telah membuat perubahan ke arah yang lebih baik terkait meningkatnya standar pendapatan pekerja tekstil wanita di Bangladesh setiap tahunnya. Hal ini dikatakan sebagai salah satu yang dipengaruhi oleh ILO karena dengan diperbaharunya Labor Act 2006 yang telah disusun oleh ILO ke Labor Rules 2015 salah satunya. Tabel dibawah ini akan menunjukkan 4 perubahan yang dilakukan oleh ILO dari Labor Act 2006 ke Labor Rule 2015.

Labor Act 2006	Labor Rule 2015
Pekerja wanita tidak difasilitasi atau diberikan hak memilih apakah mereka mau atau tidak bekerja lembur.	Diberikan hak untuk mengisi formulir persetujuan lembur kerja jika lanjut bekerja di antara jam 10 malam sampai jam 6 pagi.
Dijelaskan cara menyelamatkan diri dari musibah musibah namun	Dijelaskan secara rinci terkait cara cara menyelamatkan diri dari bencana seperti kebakaran,

masih sedikit dan belum rinci.	robah gedung dan gempa bumi.
Belum difasilitasi dan edukasi terkait penuntutan dan formulir serta persyaratannya.	Diberi formulir terkait pengesahan dan persyaratan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memudahkan pekerja.
Surat penunjukkan harus dikeluarkan untuk mempekerjakan tenaga kerja.	Surat penunjukkan wajib berisi informasi tertentu terkait gaji, tunjangan keuangan, aturan yang berlaku dan banyak yg terkait pekerjaan.

Labor Act 2006 diperbarui ke Labor Rules 2015 dikarenakan kurang relevan untuk digunakan sekarang dan masih kurang mengikat dan kuat untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia dan kerja paksa yang tidak diinginkan.

c. Aktor Independen

Peran ketiga yang seharusnya dimiliki oleh organisasi internasional adalah sebagai aktor independen. Dalam sistem internasional, organisasi internasional merupakan aktor independen. Namun bukan berarti aktor independen ini dapat bertindak di kancah global dan tidak terpengaruh oleh dunia luar, mengatur dan memiliki otonom jika organisasi internasional harus memiliki kriteria ini maka akan sangat sedikit yang memenuhinya. Namun organisasi internasional bukan merupakan suatu hal yang bisa dianggap mudah karena sejumlah organisasi internasional

mampu mempengaruhi peristiwa yang terjadi di dunia dan sistem politik internasional.

Organisasi internasional merupakan aktor independen berarti organisasi ini dapat membuat keputusan secara independen tanpa adanya intervensi dari kepentingan salah satu negara anggota. Para pekerja garmen wanita di Bangladesh kekurangan edukasi formal sehingga mereka tidak mengetahui atau menyadari mana yang menjadi hak mereka sebagai manusia dan pekerja. Oleh sebab itu, ILO mengadakan pelatihan terhadap buruh dan calon buruh tekstil tanpa adanya campur tangan kepentingan negara-negara dari sektor manapun. Salah satu program yang berjalan di Work in Freedom membantu anak-anak perempuan dan perempuan usia produktif untuk mengetahui hak-hak mereka seperti memberikan pelatihan, informasi dan pendidikan agar mereka mengetahui hak-hak mereka jadi mereka akan mengetahui apabila mereka diperlakukan tidak adil dan tidak semestinya.

Materi IEC yang telah diajarkan melalui program ini masih berhubungan dengan para pekerja migran dan pencegahan terhadap perdagangan manusia yang telah dikembangkan oleh pemerintah, non-pemerintah dan agensi-agensi UN. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak pekerja dan jalan menuju pekerjaan yang baik ini dilakukan oleh Migrant Forum Asia (MFA) di Bangladesh. Bekerjasama dan menyebar di Joypurhat, Narail, Dhaka dan Manikganj pada bulan Agustus

2014. Negara tidak melakukan intervensi kepentingan pribadi kepada program ini termasuk ILO dalam perjalanannya dan hal ini dapat dilihat berdasarkan kerjasama ini ILO dengan MFA dan mitra lokal membangun metode dan materi yang lebih kuat dan sebagai mekanisme pemantauan. Tidak adanya intervensi yang dilakukan negara maupun pemerintah kepada organisasi internasional yang hanya bertujuan bagi pemerintahan atau kepentingan salah satu negara saja.

Program ini bertujuan penuh untuk meningkatkan kesejahteraan hidup wanita pekerja garmen yang dibawah rata-rata. selain itu program IEC ini juga untuk meningkatkan awareness para pekerja wanita ini terhadap pelecehan yang kerap dirasakan, biasanya hal ini terjadi namun karena kurangnya sosialisasi dan edukasi membuat mereka mewajarkan hal-hal itu dengan dalih takut untuk berbicara, tidak tahu bahwa itu adalah pelecehan, takut jika disalahkan, dipecat dan masih banyak ketakutan yang mereka dapat setiap harinya tanpa merasa kebebasan dalam bekerja.

Peningkatan yang dapat dilihat setelah adanya program edukasi pekerja ini salah satunya adalah meningkat nya awareness masyarakat terutama pekerja garmen wanita maupun laki-laki yang sedikit-sedikit mulai mengetahui hak dan kewajiban yang memang wajib mereka terima karena telah melakukan pekerjaan mereka sebagaimana seharusnya. Pekerja yang telah ter-edukasi ini pasti

sedikit banyak terpengaruh dan ingin bergerak menuntut apa yang sudah seharusnya menjadi milik mereka, hal ini berpengaruh ke para demonstran yang menuntut kenaikan upah minimum kerja yang akhirnya ditanggapi oleh pihak pemerintah. Upah minimum pekerja yang didapatkan bahkan tidak mencukupi hidup sehari-hari. Pada tahun 2018 upah minimum kerja yang diminta oleh para serikat pekerja sebanyak US\$95 namun kenaikan upah yang diberi pemerintah hanya sebanyak US\$63. Pekerja yang tergabung dalam serikat buruh menolak tawaran pemerintah ini dengan alasan bahwa hal ini tidak adil dan memberatkan para pekerja garmen.

Melihat bagaimana buruh bertindak terhadap hak-haknya kini lebih daripada sebelum tahun 2013 tidak bisa menutup mata bahwa hal ini sedikit banyak ada campur tangan dari kebijakan dan bantuan ILO yang membuka pengetahuan mereka dengan berperan menjadi aktor independen dari organisasi internasional yang berhasil karena telah membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini termasuk kedalam kategori peran ILO sebagai aktor independen karena ILO sebagai organisasi internasional berperan menjadi media dari investor yaitu UK DFID dengan negara-negara yang terkait program Work in Freedom seperti Bangladesh, Nepal dan India. UK DFID sebagai investor tidak mendapatkan keuntungan apa-apa selain memberikan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan para pekerja tekstil wanita sebagai target program. dan karena menargetkan

masyarakat dan pekerja wanita tekstil ke individu dan kelompok bukan ke negaranya.

B. Analisis Fungsi ILO Dalam Program *Work in Freedom* Bagi Pekerja Garmen Wanita di Bangladesh.

Organisasi internasional dapat berperan menjadi instrumen, arena dan aktor independen di hubungan internasional dan mempengaruhi sistem politik baik domestik dengan negara yang bekerjasama maupun secara internasional. Organisasi internasional dapat berperan dengan baik dalam politik internasional dikarenakan tercapainya fungsi-fungsi dari organisasi internasional untuk memenuhinya. Menurut Almond dan Powell, agar berfungsi, setiap sistem membutuhkan sumber daya untuk mengubah hal hal yang masuk yang tadinya mentah menjadi sebuah sistem yang terlihat. Hal ini disebut fungsi konversi, fungsi konversi perlu memelihara dan beradaptasi agar menjadi relevan dan dapat diaplikasikan di lingkungan dan hubungan sekitarnya. inilah perilaku sistem sebagai suatu unit dalam hubungannya dengan sistem sosial lain dan lingkungan sekitarnya

Di sistem politik internasional terdapat aktor-aktor internasional seperti *International Organization, Multinational Company, Governments, International Non-Governmental Organizations, Individuals* dan masih banyak lagi. Aktor-aktor ini selalu memiliki tuntutan terhadap sistem politik internasional seperti suatu hal yang dilakukan harus membawa perdamaian, harus mendistribusikan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi syarat-syarat agama atau budaya dan masih banyak lagi. Tuntutan-tuntutan itu dikumpulkan atau disatukan oleh negara

bagian, suatu kelompok atau individu, yang bekerjasama bisa secara bilateral, multilateral, ad hoc, konferensi dan bisa juga melalui organisasi. (Archer, 2001, 93)

Di sub-bab ini penulis akan berusaha menjabarkan fungsi-fungsi organisasi internasional yang tercapai dan telah berhasil diaplikasikan oleh ILO dengan program Work in Freedom terhadap pekerja garmen wanita di Bangladesh. Begitu pula fungsi-fungsi yang tidak tercapai atau tidak diaplikasikan dalam perjalanan lima tahun program Work in Freedom di Bangladesh.

a. Artikulasi dan agregasi

Organisasi internasional berfungsi sebagai artikulasi dan agregasi dalam urusan kepentingan internasional seperti asosiasi kelompok tertentu untuk suatu kepentingan tertentu. Dalam hal ini, dengan program Work in Freedom terlihat bahwa fungsi ILO untuk artikulasi dan agregasi berhasil dicapai. Bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi domestik dan internasional seperti *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)*, *Migrant Forum Asia (MFA)*, *Anti Slavery International (ASI)*, *International Domestic Workers' Network*, *International Trade Union Congress (ITUC)*, *Self Employed Women's Association (SEWA)* and *London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)*. (International Labor Organizations, 2014). Bersama-sama mengumpulkan kepentingan masing-masing untuk menjadi suara nasional serta masalah bersama yang harus diselesaikan.

Program ini berfokus kepada peningkatan kesejahteraan pekerja wanita di sektor garmen baik domestik maupun migran begitu juga Migrant Forum Asia yang memiliki keresahan dan goals yang sama oleh sebab itu mereka bekerjasama untuk membuat hal itu terjadi dan didapatkan oleh orang yang semestinya. Kerjasama ini berjalan dengan membuat materi edukatif yang diajarkan oleh MFA bersamaan dengan ILO untuk mengedukasi para pekerja wanita baik migran maupun domestik terutama di sektor garmen tentang pentingnya pengetahuan akan hak-hak pekerja yang seharusnya mereka dapatkan dan itu adalah kewajiban dari pabrik tempat mereka bekerja. Tidak hanya saat sudah mulai bekerja, hal ini juga mencakup sistem perekrutan pekerja yang terkesan tidak adil dan menekan terutama pada wanita.

b. Norma

Menurut Archer, peran dan kontribusi organisasi internasional sebagai arena, instrumen dan aktor independen untuk kegiatan normatif sudah cukup besar dan berpengaruh di sistem politik internasional. Namun pembuatan norma sebagai fungsi dari organisasi internasional di politik internasional dan sistem internasional bukanlah proses yang sederhana karena tidak sedikit IGO dan INGO yang ingin berkontribusi dan hal ini menambah daftar panjang karena semakin banyaknya yang akan terpengaruh.

Seperti pembuatan norma atau peraturan yang harus dipatuhi dan mengikat bagi seluruh pihak. Dalam pengimplementasian fungsi dari organisasi internasional oleh ILO di program Work in Freedom ini, dengan pengkajian ulang dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan tentang perekrutan dan pekerjaan yang akan didapatkan terkait pekerja tekstil dan pekerja migran di daerah asal dan daerah penerima terutama perempuan. Banyaknya undang-undang dan kebijakan yang tumpang tindih terkait hal ini membuat kebijakan yang ada dan diterapkan menjadi ambigu dan tidak pasti. ILO sebagai organisasi internasional yang berfungsi menjadi norma di sistem internasional, disini ILO mengkaji dan mengawasi pengimplementasian kebijakan ini di kehidupan nyata. Norma-norma yang diturunkan oleh ILO terutama di Work in Freedom salah satunya dengan menurunkan Labor rules 2015 untuk memudahkan para pekerja dan calon pekerja mengetahui hak serta kewajiban mereka.

c. Penerimaan

Organisasi internasional memiliki fungsi yang penting dalam proses perekrutan peserta di sistem politik internasional. menurut Archer dalam bukunya IGO hampir secara eksklusif terdiri dari perwakilan negara berdaulat yang memberikan sesuatu bisa peminjaman uang, pembangunan negara, pembangunan masyarakatnya dan masih banyak lagi ke wilayah yang tidak berdaulat atau belum merdeka untuk mencapai kemerdekaannya.

Organisasi internasional berhak merekrut anggota ke suatu program atau ke dalam organisasinya dengan kesepakatan kedua belah pihak, organisasi internasional terutama non-pemerintah telah merekrut mitra kedalam sistem politik internasional dengan mengelompokkan aktor-aktor internasional dengan tujuannya, seperti mendukung pemerintahan dunia, memperlebar kerjasama komersial, memperluas kepercayaan agama dan organisasi internasional sudah memberi pengaruh yang luas dengan fungsi ini.

Dengan pemahaman archer yang seperti ini, fungsi ILO terutama program Work in Freedom memilih mitra yang memiliki kesamaan visi terkait perdagangan manusia dan kerja paksa. Perekrutan kerjasama untuk memperluas cakupan masyarakat yang dapat menerima bantuan dan memperluas sektor bantuan yang akan diberikan dari ILO dengan rekan rekan yang lainnya. Memperlakukan penerimaan yang adil dan tertata dengan visi misi yang sedang dijalankan ILO merupakan salah satu cara untuk memperbaiki sistem yang sudah rusak bersama sama agar semaksimal baik dan relevan.

d. Sosialisasi

Sosialisasi sebagai salah satu fungsi organisasi internasional menurut Archer bertujuan menanamkan kesetiaan individu ke sistem politik dimanapun mereka hidup dan untuk mendapatkan penerimaan dari nilai yang berlaku di sistem dan

lembaganya. Agen sosialisasi dapat dicontohkan seperti sekolah dan gereja, di negara yang baru merdeka agen sosialisasinya bisa seperti angkatan bersenjata, bendera, lagu kebangsaan, suku dan juga keluarga. Sosialisasi di sistem politik internasional terjadi di seluruh bagian, di sektor pekerja ada serikat pekerja yang mensosialisasikan solidaritas pekerja, hak-hak pekerja dan banyak lagi. (Archer, 2001, 99-100)

Di kasus pekerja tekstil wanita migran ini, ILO sebagai organisasi internasional yang mensosialisasikan tentang hak-hak pekerja terutama wanita di sektor tekstil dengan program IEC yang mengedukasi para wanita pekerja untuk meningkatkan kesadaran mereka dan lebih memiliki rasa kepemilikan dengan dirinya, bahwa mereka bukan sekedar pekerja jasa yang bekerja berlebihan dan dibayar sesedikit mungkin. Selain edukasi terhadap skill dan kesadaran atas hak-haknya, ILO dengan program Work in Freedom memfokuskan para wanita ini untuk mengetahui dasar dasar hukum yang melindungi mereka di pekerjaannya. Para pekerja tekstil yang sudah dilatih oleh ILO melalui program ini kemudian diberi buku saku berisi regulasi migrasi yang aman dan bagaimana perdagangan manusia terjadi untuk menghindari meningkatnya kasus ini.

e. Pembuatan Kebijakan

Fungsi organisasi internasional sebagai pembuat kebijakan lebih jelas lagi daripada fungsi sebagai sosialisasi. di bukunya,

Archer menulis enam daftar prinsip utama yang harus dipatuhi oleh setiap organisasi internasional dalam pembuatan keputusan. Prinsip-prinsip ini ada untuk menurunkan peran otonom dari lembaga organisasi itu sendiri. Fungsi ini memberikan fokus ke menetapkan aturan yang berlaku di sistem politik internasional terlepas dari teknik pembuatan dan proses yang digunakan oleh organisasinya. Bisa berupa pembuatan kebijakan ataupun perubahan kebijakan yang berlaku. (Archer, 2001, 102-103)

Pembuatan kebijakan yang terjadi di program Work in Freedom di Bangladesh ini termasuk salah satunya adalah mengubah dan membuat tambahan kebijakan yang tadinya Labor Act (2006) menjadi Labor Rule 2015. Terkhusus untuk Bangladesh karena setiap negara memiliki perbedaan cara dalam mengatasi masalahnya. Dalam Labor Rule 2015 membahas salah satunya tentang upah yang lebih rinci ketentuan terkait dengan upah, kurangnya upah yang cukup merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh negara-negara Asia Selatan.

f. Pengaplikasian Kebijakan

Rule Application atau penerapan kebijakan menurut Archer dalam sistem politik di ranah domestik biasanya penerapan kebijakan yang telah dibuat dilakukan oleh pemerintah dan turunannya. Seperti badan militer, negara polisi atau angkatan bersenjata lainnya. Di sistem politik internasional, penerapan aturan murni diserahkan kepada pemerintah negara masing-masing

karena tidak ada otoritas pusat internasional dengan agen yang bertugas untuk menjalankannya. Pembuatan kebijakan atau pengkajian ulang terlibat proses politik yang saling menguntungkan. (Archer, 2001, 104)

Disini, ILO dengan peran instrumen yang membuat kebijakan dan mengkaji ulang suatu kebijakan yang telah ada namun tetap memberikan hak kepada negara sepenuhnya terkait pelaksanaannya. Peran ILO hanya mengawasi apakah kebijakan yang telah dikaji ulang dan diterapkan ini berjalan dengan baik ataukah tidak. Seperti kebijakan akan kenaikan upah minimum pekerja yang semakin tahun kian meningkat. Jika kebijakan ini atau peraturan ini tidak diindahkan dan masih sering dilanggar, pelanggaran ini diturunkan lagi ke fungsi lain dari organisasi internasional yaitu Rule Adjudication.

g. Penegakan Kebijakan

Fungsi Rule Adjudication menurut Archer bertujuan untuk mengumumkan hukum yang ada dan berlaku, dikarenakan lembaga hukum tidak terlibat dalam proses politik pembuatan kebijakan. Proses adjudikasi kebijakan di sistem internasional tidak memiliki kelembagaan yang luas dan wajib seperti sistem negara. Jika dilihat lebih teliti lagi, organisasi internasional memunculkan lebih banyak lagi putusan hukum terkait pembuatan peraturan yang berhubungan dengan jalannya internal organisasi. Fungsi penting ini masih dipegang dan dimainkan oleh institusi tertentu yang

bertugas untuk memutuskan klaim yang saling bertolak belakang. Jika tingkat negara memiliki pengadilan negara sebagai lembaga hukum berdaulat, politik internasional memiliki International Court of Justice (ICJ) sebagai salah satu lembaga penegak hukum. (Archer, 2001, 106)

Dalam melakukan fungsinya sebagai pengadilan kebijakan, di dalam serikat pekerja ada yang dinamakan pengadilan ketenagakerjaan di setiap negara salah satunya di Bangladesh. dimana para pekerja dapat mengadukan ketidakadilan yang mereka alami seperti, kenaikan upah yang tidak diindahkan itu membuat para pekerja tekstil ini marah dan akhirnya protes di depan lembaga hukum yang berwenang. Dan saat negara diam tidak merespons, ILO sebagai organisasi internasional yang menaungi para pekerja ikut turun tangan dengan memberikan teguran kepada kementerian ketenagakerjaan Bangladesh yang pada akhirnya kenaikan upah dapat dicapai.

h. Informasi

Menurut Archer, fungsi organisasi internasional lainnya adalah bertindak sebagai media informasi yang memberi materi cetak dan mempublikasikannya ke khalayak ramai. Informasi ini kemudian disebarluaskan lagi oleh pemerintah negara berdaulat untuk menyebarkannya kepada masyarakatnya (Archer, 2001, 107). Dengan pemahaman archer dan melihat pengaplikasian konsep ini terhadap bagaimana ILO sebagai organisasi

internasional berfungsi sebagai pemberi informasi terutama di program Work in Freedom ini adalah, ILO memberi informasi terkait negara-negara yang masuk ke dalam program ini seperti Bangladesh, Nepal dan India bersangkutan dengan menyebarluaskan informasi tentang para buruh dan pekerja migran tekstil wanita di negara-negara ini. Di Bangladesh khususnya, ILO bekerjasama dengan pemerintah Bangladesh, GAATW dan MFA dalam menyebarkan informasi terutama di daerah Jessore, Manikjang dan Narayanaganj.

i. Operasi

Fungsi organisasi internasional yang terakhir adalah menjalankan sejumlah fungsi operasional. Sama dengan cara pemerintah seperti perbankan, memberikan bantuan bagi yang membutuhkan, membantu pengungsi, berurusan dengan komoditas dan banyak lagi sesuai cabang fokus organisasi internasional itu sendiri. Operasi-operasi yang dilakukan oleh organisasi internasional terkait dengan tata kelola global. Dalam mengimplementasikan fungsi ini cukup jelas ILO memberikan bantuan untuk meningkatkan keterampilan pekerja tekstil dengan training yang dilakukan di Bangladesh serta memberi bantuan kepada calon pekerja untuk menemukan perekrut jasa yang sesuai perundang undangan.

C. Hasil Analisis

Berdasarkan penelitian diatas yang dicapai dari penggabungan antara teori organisasi internasional yang telah dipaparkan oleh Archer dan analisis peran serta fungsi yang telah dijalankan oleh ILO, dapat disimpulkan bahwa ILO telah menjalankan tugasnya secara lengkap dengan menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan pemaparan Archer yang dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 1 Peran ILO dalam program Work in Freedom bagi pekerja garmen wanita di Bangladesh dan hasil implementasi peran ILO sebagai organisasi internasional dengan Bangladesh.

No.	Peran ILO Dalam Program <i>Work in Freedom</i> Bagi Pekerja Garmen Wanita di Bangladesh.	Hasil Implementasi Peran ILO Sebagai Organisasi Internasional dengan Bangladesh.
1	Arena	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan tempat bagi para buruh untuk menyampaikan ketidak adilan yang mereka dapatkan dan ketidak tercapaian hak haknya.- Diadakannya pertemuan-pertemuan bagi para mitra ILO untuk membantu

		<p>mencapai tujuan yang sama yaitu ketercapaian hak asasi manusia yang penuh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan ini juga dirancang untuk menyatukan visi agar tercapainya tujuan bersama antara mitra ILO dan para buruh garmen wanita di negara negara kerjasama <i>Work in Freedom</i> termasuk Bangladesh.
2	Instrumen	<ul style="list-style-type: none"> - ILO telah mengkaji dan memperbaharui kebijakan yang telah ada dan berjalan di lima negara dengan program <i>Work in Freedom</i> - Kebijakan yang dibawa ILO untuk menangani kasus ini salah satunya dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama dengan <i>Confederation of Private Employment Agencies (CIETT)</i> perjanjian tersebut bertujuan untuk mendorong

		<p>perekrutan pekerja secara adil bersama dengan program <i>Work in Freedom</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ILO bekerjasama dengan <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> (UNODC) dalam bertindak terhadap pencegahan dan menghadapi pelecehan serta penipuan dalam perekrutan tenaga kerja. Diinisiasi oleh ILO dan diresmikan di Geneva pada sesi ke-29 <i>Human Rights Council</i> sebagai upaya bersama dalam pencegahan perdagangan manusia melalui pengaturan perekrutan tenaga kerja.
3	Aktor Independen	<ul style="list-style-type: none"> - Peran ILO sebagai aktor independen terlihat dengan salah satu misi <i>Work in Freedom</i> yaitu mengedukasi para pekerja tekstil dengan mengajari mereka materi akan hak asasi manusia yang seharusnya mereka terima dan

		dapatkan.
--	--	-----------

Tabel 2 Fungsi ILO dalam program Work in Freedom bagi pekerja garmen wanita di Bangladesh dan hasil implementasi peran ILO sebagai organisasi internasional dengan Bangladesh.

No.	Fungsi ILO Dalam Program <i>Work in Freedom</i> Bagi Pekerja Garmen Wanita di Bangladesh.	Hasil Implementasi Fungsi ILO Sebagai Organisasi Internasional dengan Bangladesh.
1.	Artikulasi dan agregasi	- Berfungsi dengan menyediakan program Work in Freedom bagi tercapainya hak asasi yang wajib didapatkan juga oleh para pekerja tekstil wanita.
2.	Norma	- Memberlakukan dan mengawasi akan norma-norma di lapangan kerja maupun di mata hukum. Dengan memperbarui hukum yang berlaku,

		dan juga mengawasi di pengadilan terkait buruh saat lapangan.
3.	Penerimaan	<ul style="list-style-type: none"> - ILO terutama program Work in Freedom memilih mitra yang memiliki kesamaan visi terkait perdagangan manusia dan kerja paksa. Perekrutan kerjasama untuk memperluas cakupan masyarakat yang dapat menerima bantuan dan memperluas sektor bantuan yang akan diberikan dari ILO dengan rekan rekan yang lainnya.
4.	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - ILO melakukan sosialisasi terhadap hak seorang manusia dan hak seorang pekerja yang harus didapatkan. - ILO melakukan kerjasama terkait edukasi masyarakat pekerja tekstil untuk mendapat pengetahuan terkait keselamatan kerja, protes dan masalah rekrutmen yang baik.
5.	Pembuatan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan kebijakan oleh program

		<p><i>Work in Freedom</i> dimulai dengan mengkaji ulang hukum dan peraturan yang telah ada dan berjalan serta bagaimana implementasinya terhadap korban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan perubahan kepada menteri yang bersangkutan bila ada yang tidak sesuai dan merancang solusinya - Jika diperbolehkan dan disahkan oleh pemerintah negara maka itu akan menjadi hukum baru yang berdaulat.
6.	Pengaplikasian Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - ILO berfungsi sebagai pengawas terkait apakah kebijakan yang telah dikaji ulang dan diterapkan ini berjalan dengan baik ataukah tidak. Seperti kebijakan akan kenaikan upah minimum pekerja yang semakin tahun kian meningkat.
7.	Penegakan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam melakukan fungsinya sebagai pengadilan kebijakan, di dalam

		<p>serikat pekerja ada yang dinamakan pengadilan ketenagakerjaan di setiap negara salah satunya di Bangladesh.</p>
8.	Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi terkait hak-hak pekerja, kesehatan dan keselamatan kerja yang harus dipahami oleh para pekerja tekstil terutama yang berada di gedung bertingkat agar kejadian Rana Plaza 2013 tidak terulang lagi
9.	Operasi	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan visi misi yang telah dibangun dari awal guna tercapainya tujuan utama. Bagi para pekerja tekstil wanita di Bangladesh maupun di 5 negara utama. - Mengawasi dan berperan menjadi mediator antara pekerja dan negara demi tercapainya jalan tengah bagi kedua belah pihak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak dalam kandungan. Termasuk memiliki bayaran yang sepadan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Namun tidak semua hal di dunia ini berjalan mulus sesuai norma yang berlaku, wanita-wanita pekerja tekstil di Bangladesh contohnya. Mereka bekerja dari matahari terbit hingga tengah malam sampai pekerjaannya selesai. Namun bayaran yang mereka dapatkan tidak sepadan jika dibandingkan dengan jasa yang telah mereka keluarkan.

Dengan bayaran yang hanya Rp.18.000 per-hari dan diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok saja sudah merupakan penyiksaan terhadap fisik dan batin mereka. Oleh karena itu, International Labor Organization (ILO) sebagai organisasi buruh internasional ikut turun tangan mengatasi hal yang terjadi secara menahun ini. Dengan program Work in Freedom yang diharapkan bisa membantu menegakkan keadilan dan memperoleh apa yang telah menjadi hak yang wajib didapatkan oleh para pekerja tekstil ini. Work in Freedom adalah program dengan rentang waktu 5 tahun lamanya. Berdasarkan analisis peran dan fungsi ILO di dalam kasus ini, Work in Freedom dapat dikatakan membantu proses perolehan hak para pekerja tekstil wanita karena kenaikan upah yang didapatkan setiap tahunnya setidaknya meringankan

beban para pekerja. Selain itu adanya Work in Freedom kedua yang masih tetap dibiayai oleh UK DFID (United Kingdom Department for International Development) merupakan bukti bahwa Work in freedom pertama bukanlah sebuah kegagalan dan harus diulang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi bagi para pekerja internasional.

Peran penting ILO sebagai organisasi internasional di program ini dapat membuktikan kemampuan ILO menangani kondisi ketidakadilan yang dihadapi pekerja tekstil terutama wanita setiap harinya. Selain itu dengan kelanjutan ILO 2019-2024 dapat menjadi pengawas jikalau adanya hal-hal yang diluar dugaan terjadi lagi. ILO berperan sebagai tempat bagi para pekerja tekstil mendapat keadilan dan mengadakan pertemuan pertemuan dengan para mitra yang dapat memudahkan pencapaian tujuan bersama, mengkaji ulang hukum yang berlaku, mengedukasi para pekerja tekstil terhadap hak mereka, mengawasi perusahaan penyedia jasa dan bagaimana rekrutmennya merupakan keberhasilan yang baik dan bermanfaat untuk para pekerja.

Sebagai negara, Bangladesh membantu berjalannya program ini dengan bekerjasama dengan ILO untuk memberantas ketidak adilan yang terjadi di negaranya demi keseimbangan negara. Karena dengan alasan apapun, pemberian upah yang tidak sepadan dengan pekerjaan yang harus dilakukan, pelecehan di tempat kerja, kurangnya edukasi pekerja dan alasan lainnya tidak dapat diterima apalagi hanya karena keterbatasan gender. Kenaikan upah yang didapatkan oleh para pekerja tekstil wanita ini juga memang tidak murni karena ILO semata namun juga ada

partisipasi dari protes yang dilakukan para pekerja untuk menaikkan upah minimum agar mereka bisa sedikit bernafas. Pada tahun 2014 - 2018 Bangladesh bertahan di angka 5300 BDT. Pemerintah Bangladesh bungkam sampai akhirnya protes kembali dilakukan di tahun 2018 dan kenaikan upah sebesar 2700 BDT yang menjadi 8000 dan di tahun 2020 terjadi kenaikan lagi sebesar 100 BDT. Bukan tidak mungkin angka ini dicapai karena para pekerja yang sudah teredukasi lewat buku saku dan training *Work in Freedom* oleh ILO ini.

Namun meskipun *Work in Freedom* sebagai program kerjasama ILO dengan Bangladesh bukan sebuah kegagalan, bukan berarti hal ini memperbaiki semua permasalahan terkait pekerja tekstil wanita. Bangladesh masih memiliki banyak PR terkait pekerja tekstil wanita, mengingat banyaknya masyarakat dan mayoritas dari mereka bekerja di sektor ini tentu ada sebagian yang tidak terjamah dan belum sempat diselamatkan oleh program ini. Itu sebabnya ILO masih melanjutkan kerjasama dengan Bangladesh dengan *Work in Freedom* ke 2 yang berjalan di tahun 2018-2023.

B. Rekomendasi

Penelitian ini telah menganalisis terkait peran dan fungsi ILO sebagai organisasi internasional dalam menangani hak pekerja tekstil di Bangladesh dengan program *Work in Freedom*. Sehingga Bangladesh sebagai negara menjadi terpacu untuk meningkatkan keadilan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakatnya karena telah berada di sorotan.

Selanjutnya penulis merekomendasikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kerjasama yang dilakukan Bangladesh dengan perusahaan-perusahaan mode cepat seperti H&M, Zara, Mango dan banyak lainnya. bagaimana kerjasama ini dibangun seperti apa saja kebijakan-kebijakan yang disepakati dan keuntungan Bangladesh untuk melihat bagaimana kesenjangan yang terjadi di Asia Selatan.

Daftar Pustaka

(n.d.). *PERMINTAAN KENAIKAN UPAH MINIMUM BURUH BANGLADESH OLEH H&M:*

ANALISIS HUBUNGAN NEGARA DAN PERUSAHAAN.

<http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahib5203957422full.pdf>

Archer, C. (2001). *International Organisations* (3rd Edition ed.). Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9780203192276>

Business & Human Rights Resource Centre. (2019). *Bangladesh: Widespread garment*

worker protests over minimum wage increase; leads to mass dismissals. Business

& Human Rights Resource Centre. Retrieved 2021, from

<https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/bangladesh-widespread-garment-worker-protests-over-minimum-wage-increase-leads-to-mass-dismissals/>

The Conscious Challenge. (2019, June 6). *Ecological Foot Print Bible*. CLOTHING & HUMAN RIGHTS. Retrieved Desember 20, 2019, from <https://www.theconsciouschallenge.org/ecologicalfootprintbibleoverview/clothing-human-rights>

THE ECONOMIC IMPACT OF THE FASHION INDUSTRY. (2015, September). Joint Economic Committee. Retrieved November 25, 2019, from https://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/638a7351-c79d-4f4d-b1f2-13a4a4ae7a77/jec-fashion-industry-report----sept-2015-update.pdf

Fair Wear Foundation. (2018). Bangladesh. *Country Study 2018*. <https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2019/03/CS-BANGLADESH-2018-def.pdf>

Helmer, V. (2019). *The 4 Modeling and Fashion Capitals of the World*. Retrieved November 25, 2019, from <https://www.thebalancecareers.com/the-big-four-modeling-and-fashion-capitals-of-the-world-2379483>

International Labor Organization. (n.d.). *Bangladesh: Major ILO programme aims to make garment industry safer*. International Labor Organization. Retrieved 2021, from <https://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects/bangladesh-rmg-programme/language--en/index.htm>

International Labor Organization. (1996). *Mission and Impact of the ILO*. Retrieved Desember 20, 2020, from

[https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index
.htm](https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm)

International Labor Organization. (2012). *Work in Freedom*. ILO Country Office for Bangladesh. Retrieved Desember 20, 2019, from
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/d
ocuments/projectdocumentation/wcms_396959.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/projectdocumentation/wcms_396959.pdf)

International Labor Organization. (2013, December 31). *Work in Freedom (ILO-DFID Partnership Programme on Fair Recruitment and Decent Work for Women Migrant Workers in South Asia and the Middle East)*. Technical Progress Report. Retrieved April 17, 2021, from
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/docume
nts/projectdocumentation/wcms_399639.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/projectdocumentation/wcms_399639.pdf) (2)

International Labor Organization. (2019, February 12). *Lessons Learned by Work in Freedom Programme*. International Labor Organizations. Retrieved April 17, 2021, from
[https://www.ilo.org/newdelhi/whatwedo/publications/WCMS_600474/lang--en
/index.htm](https://www.ilo.org/newdelhi/whatwedo/publications/WCMS_600474/lang--en/index.htm)

International Labor Organizations. (2014). *Work in Freedom - Global Partners' Meeting*. International Labor Organizations. Retrieved 2021, from
[https://www.ilo.org/newdelhi/whatwedo/eventsandmeetings/WCMS_249935/l
ang--en/index.htm](https://www.ilo.org/newdelhi/whatwedo/eventsandmeetings/WCMS_249935/lang--en/index.htm)

International Labor Organizations. (2015, January 31). *Work in Freedom (ILO-DFID Partnership Programme on Fair Recruitment and Decent Work for Women Migrant Workers in South Asia and the Middle East)*. Technical Cooperation Progress Report (TCPR). Retrieved April 21, 2021, from

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/projectdocumentation/wcms_399642.pdf (2)

International Labour Organizations. (2015). *Work in Freedom - Consultation with Private Recruitment Agencies*. International Labour Organizations. Retrieved April 27, 2021, from

https://www.ilo.org/newdelhi/whatwedo/eventsandmeetings/WCMS_449452/long--en/index.htm

Jalava, M. (2015). *Human Rights Violations In The Garment Industry Of Bangladesh*. Haaga-Helia.

Niebank, J.-C. (2018, December). Analysis Bringing Human Rights into Fashion. *German Institute for Human Rights*.

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/Analysis_Bringing_Human_Rights_into_Fashion.pdf

Ruchira, N. (2018). Social Science & Medicine. *Female Garment Workers' Experiences of violence in their homes and workplaces in Bangladesh: A qualitative Study*, 196, 150-157. 10.1016/j.socscimed.2017.11.040

Stanton, A. (n.d.). *What is Fashion, Anyway?* The Good Trade. Retrieved Desember 20, 2019, from <https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-fast-fashion>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2015, June 29). *UNODC, ILO call for action to prevent and respond to abusive and fraudulent labour recruitment*. United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved April 21, 2021, from <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2015/June/unodc--ilo-call-for-action-to-prevent-and-respond-to-abusive-and-fraudulent-labour-recruitment.html>

VOA Indonesia. (2018, September 14). *Pekerja Industri Garmen Bangladesh Tolak Kenaikan Upah Pemerintah*. VOA Indonesia. Retrieved 2019, from

<https://www.voaindonesia.com/a/pekerja-industri-garmen-bangladesh-tolak-kenaikan-upah-pemerintah-/4571511.html>

war on want. (2011, 01 28). *Sweatshops in Bangladesh*. waronwant. Retrieved April 1, 2021, from <https://waronwant.org/news-analysis/sweatshops-bangladesh>